



**PEMERINTAH KECAMATAN LAMURU  
KABUPATEN BONE**

# **LKJIP**

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**KECAMATAN LAMURU**

**JORONG MAKASSAR – KODE POS 92764**

**TELP \_**

**LALEBATA**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Lamuru Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Lamuru Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023 LKj Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Kecamatan Lamuru disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kecamatan Lamuru Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Lamuru. Komitmen dalam penyusunan LKj Kecamatan Lamuru, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Lamuru untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kecamatan Lamuru Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumber daya manusia di Kecamatan Lamuru. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa dan evaluasi terhadap

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamuru pada tahun 2021, termasuk atas analisa efesiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Lamuru Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kecamatan Lamuru Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Lalebata, 17 Februari 2022  
Camat Lamuru



**RAMLI MARSUKI, S.Sos, M.Si**  
Nip. 19650711 198611 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Umum .....	1
B. Organisasi.....	3
C. Isu Strategis.....	8
D. Aspek Strategis Organisasi.....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
A. Tujuan dan Sasaran.....	11
B. Strategi dan Arah Kebijakan .....	12
C. Indikator Kinerja Utama .....	13
D. Perjanjian Kinerja.....	15
E. Standar Penilaian Kinerja .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B. Realisasi Anggaran.....	31
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
A. Simpulan Umum .....	32
B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi .....	32



## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Susunan Pegawai Kecamatan Lamuru.....	7
2. Tabel 1.2 Komposisi SDM Organisasi .....	8
3. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023.....	11
4. Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	12
5. Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamuru .....	13
6. Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Lamuru Tahun 2021 .....	15
7. Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja .....	16
8. Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 .....	18
9. Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020.....	19
10. Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023.....	20
11. Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023.....	21
12. Tabel 3.5 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya .....	22
13. Tabel 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan .....	23
14. Tabel 3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	26
15. Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	27
16. Tabel 3.9 Realisasi Anggaran.....	31

# BAB I PENDAHULUAN

## A. UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat Pemerintahan Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kinerjanya, dampak yang diharapkan adalah terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

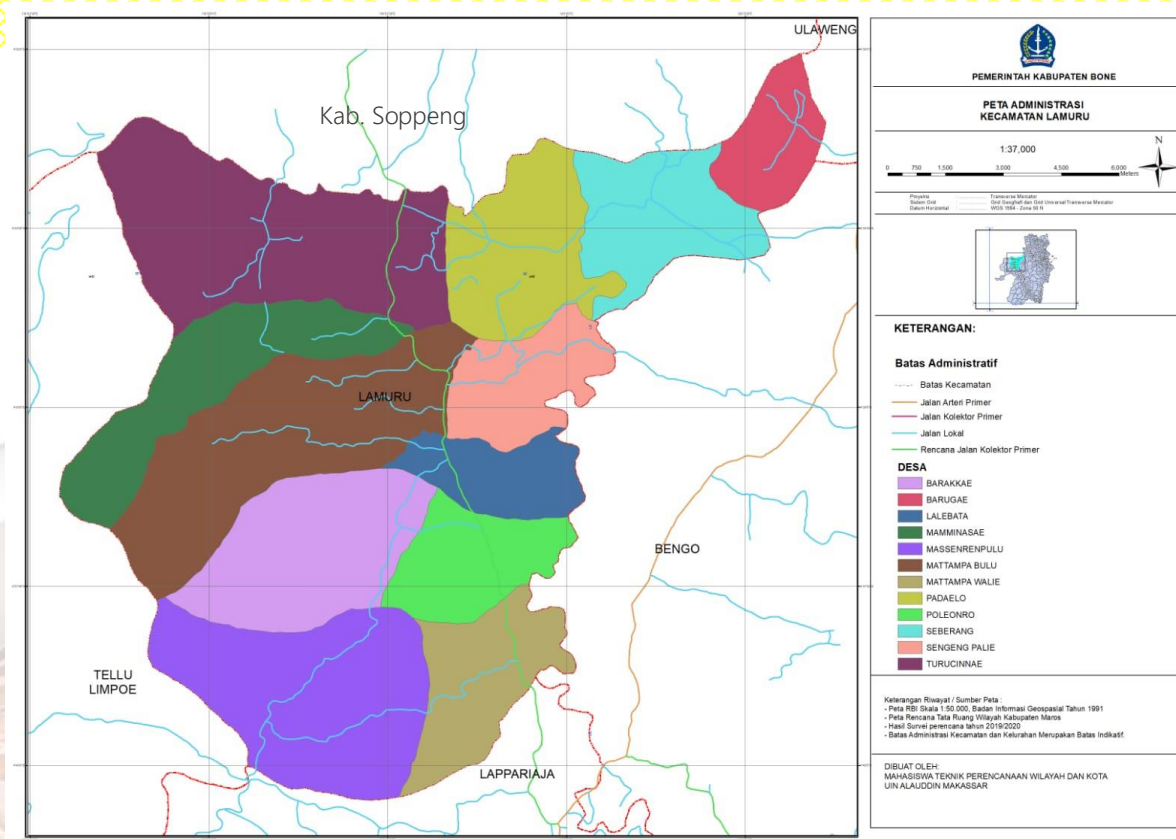
Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kecamatan Lamuru dengan koordinat geografis berada pada 17-25°LS dan 1094°BT dengan topografi berada pada lokasi daratan yang suhu sekitar 16°C-25°C dengan jarak tempuh ±80 Km dari Ibukota Kabupaten. Secara Geografis Kecamatan



Lamuru terletak pada sebelah Barat Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Amali
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lappariaja
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tellu Limpoe



Kecamatan Lamuru memiliki luas tanah sawah 2.526 Ha, dan tanah kering 14.998 Ha, lahan tersebut didominasi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, sedangkan dari sektor ekonomi Kecamatan Lamuru memiliki 2 pasar yang digunakan sebagai sarana dalam perekonomian masyarakat, kedua pasar tersebut merupakan pasar tradisional.

Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan.

Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Nasional.

## **B. ORGANISASI**

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lamuru diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor : 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

### **1. CAMAT**

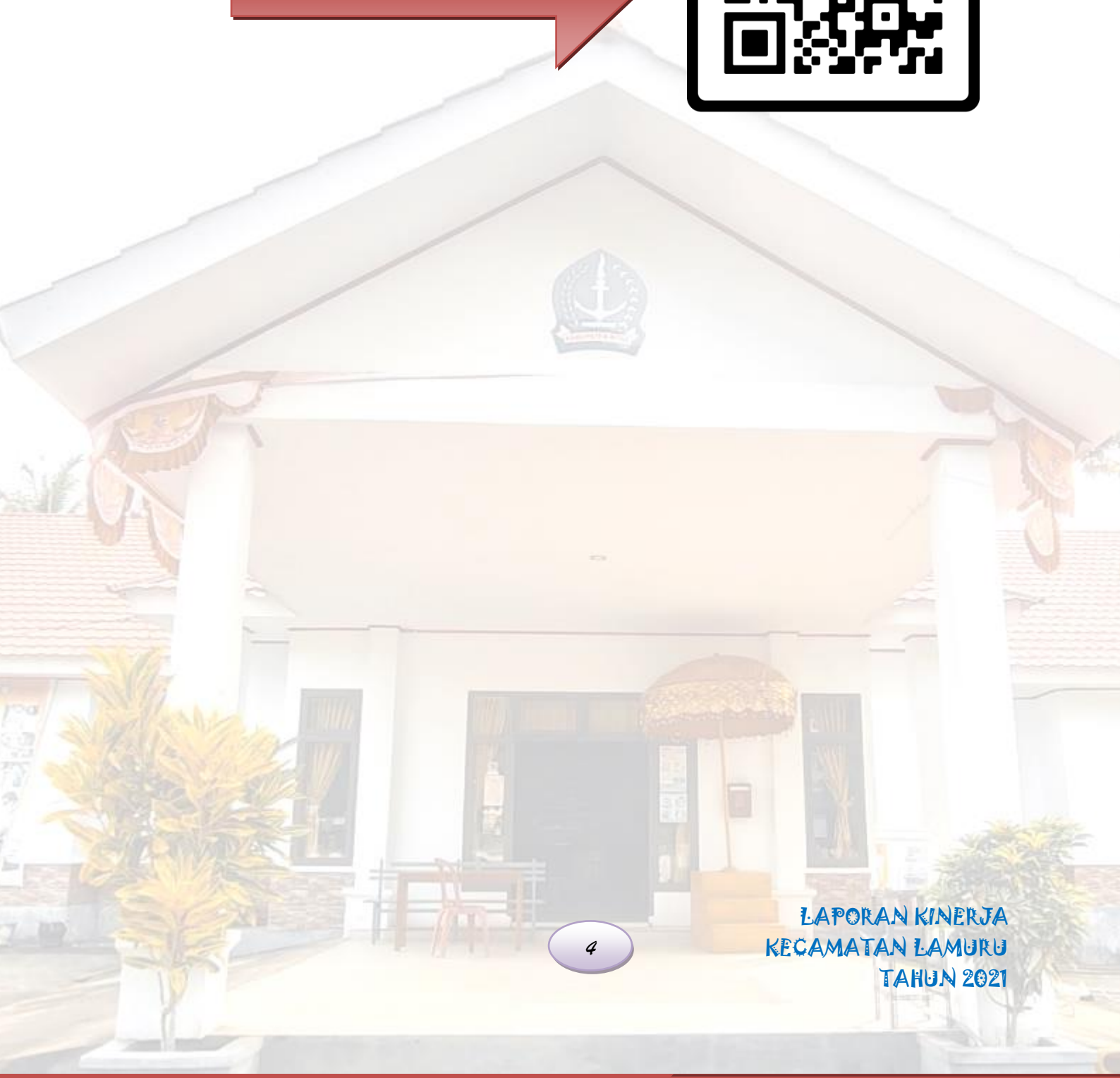
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang



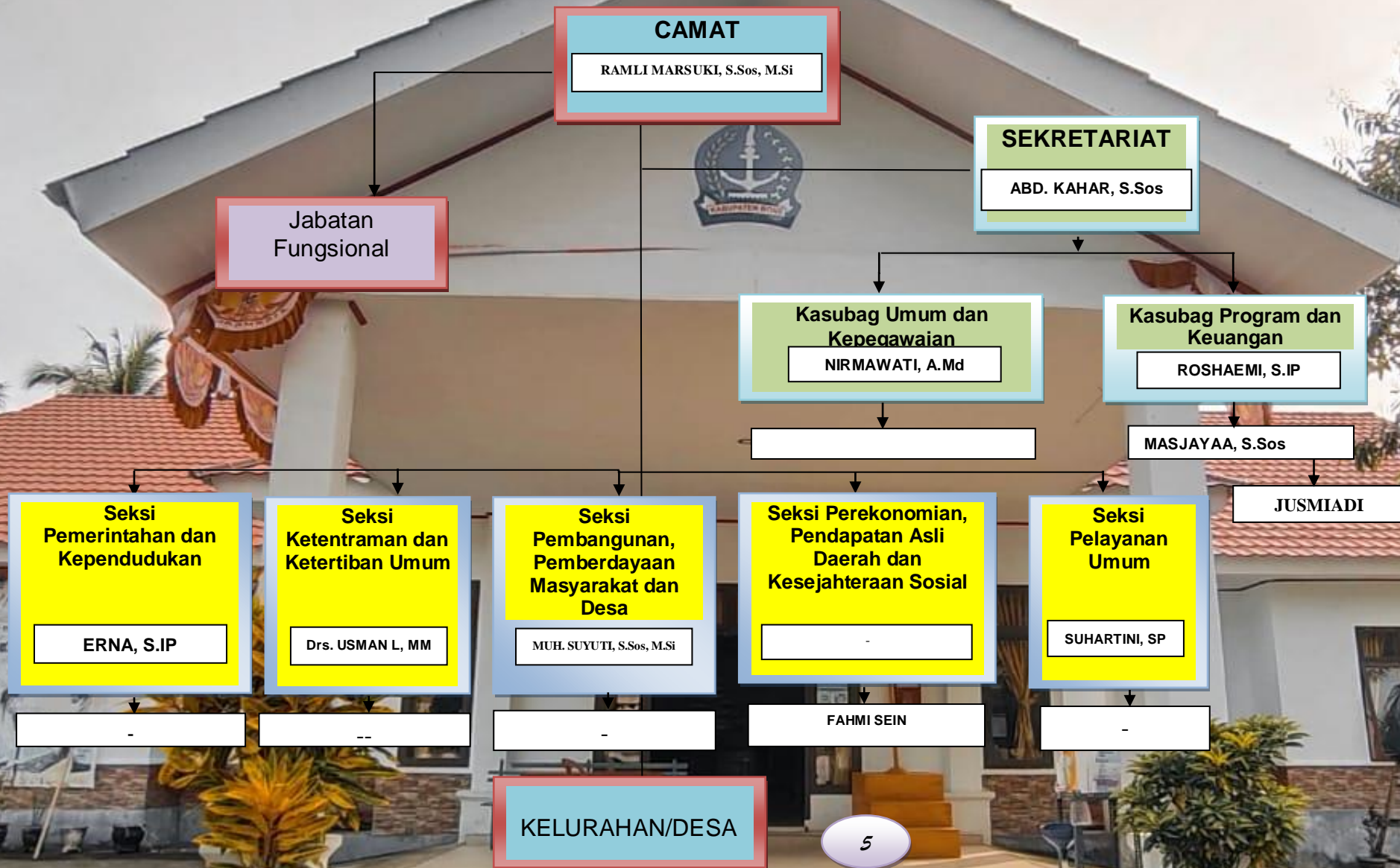
tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR Barcode berikut :



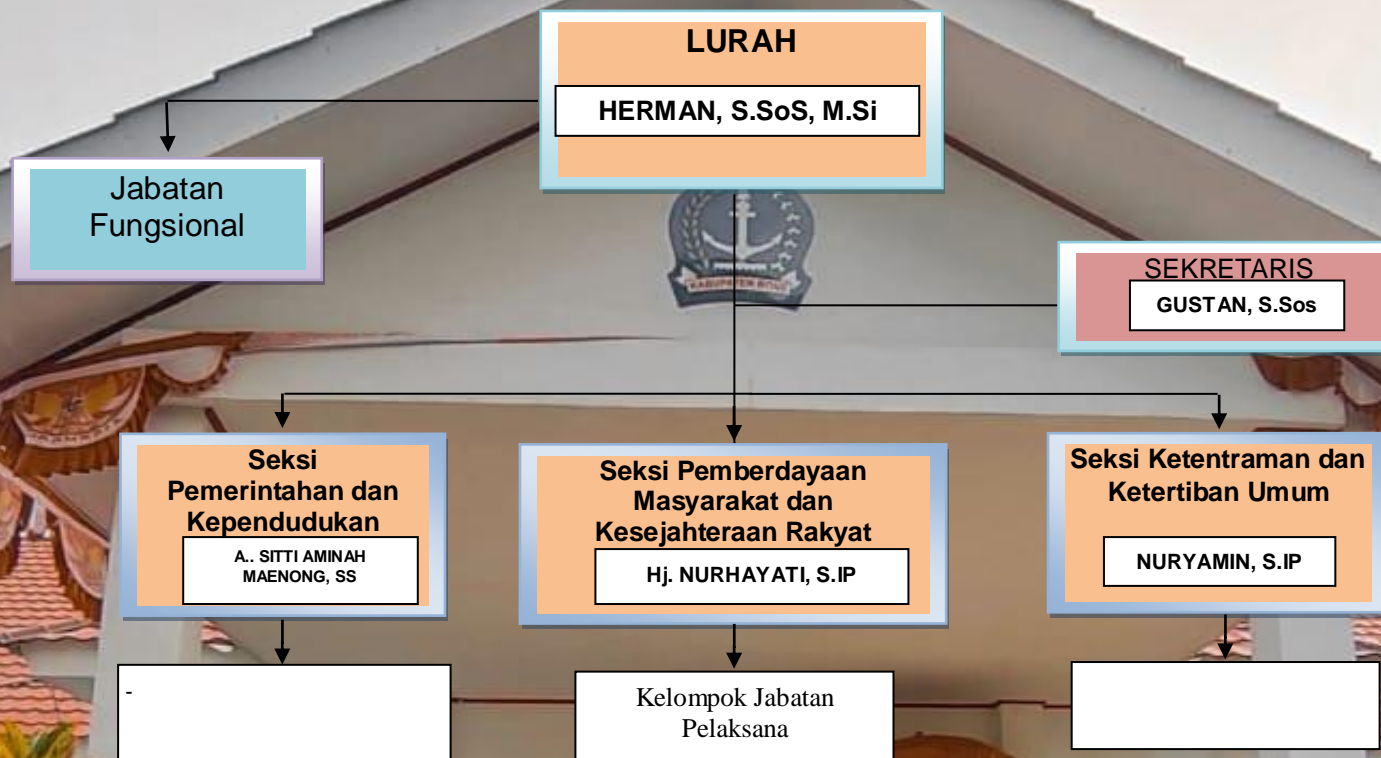
## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LAMURU







## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KELURAHAN LALEBATA





## SUMBER DAYA KECAMATAN LAMURU

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Lamuru mempunyai 11 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Susunan Pegawai Kecamatan Lamuru**

NO	SUSUNAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH PERSONIL
1	2	3
1	<b>CAMAT</b>	1
2	<b>SEKERTARIS CAMAT</b>	1
3	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	1
	- Pengadministrasi Umum	-
	- Pengadministrasi Kepegawaian	-
	- Analis Data dan Informasi	-
	- Pramu Bakti	-
4	<b>SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN</b>	1
	- Pengelola Gaji	-
	- Bendahara	1
	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1
5	<b>KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN</b>	1
	- Pengadministrasi Kependudukan	-
	- Pengadministrasi Pemerintahan	-
	- Analis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah	-
6	<b>KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	1
	- Analis Keamanan	-
	- Pengadministrasi Umum	-
	- Analisis Desa dan Kelurahan	-
7	<b>KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &amp; DESA</b>	1
	- Analis Pemberdayaan Masyarakat	-
	- Pengadministrasi Umum	-

8	<b>KASI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>		-
	-	Pengadministrasi Umum	1
	-	Analisis Perekonomian	-
9	<b>KASI PELAYANAN UMUM</b>		1
	-	Pengadministrasi Umum	-
	-	Analisis Pelayanan	-
<b>JUMLAH</b>			<b>11</b>

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Lamuru 2021

Tabel. 1.2 Komposisi SDM Organisasi

<b>KOMPOSISI SDM ORGANISASI UNIT KERJA KECAMATAN LAMURU</b>								
<b>NO</b>	<b>JENIS PENDIDIKAN</b>	<b>JML</b>	<b>NO</b>	<b>GOL.</b>	<b>JML</b>	<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JML</b>
1	SD	-	1	I	-	1	STRUKTURAL	11
2	SMP	-	2	II	1	2	FUNGSIONAL	
3	SMA	1	3	III	7			
4	DIPLOMA 1	-	4	IV	3			
5	DIPLOMA 2	-						
6	DIPLOMA 3	1						
7	STRATA 1	6						
8	STRATA 2	3						
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Lamuru 2021

### C. ISU STRATEGI

Isu strategis, adalah merupakan suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu



dicarikan alternative pemecahannya. Adapun isu strategis yang dihadapi Kecamatan Lamuru adalah sebagaiberikut :

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Lamuru sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran sertakewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dariKKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin- pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir2015.
- g. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit corona virus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah corona virus 2 (SARS-CoV-2). Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan 19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami

dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

- h. Penanggulangan Pencegahan Stunting di wilayah Indonesia sudah berbagai program dan upaya yang dikeluarkan oleh unsur pemerintah bekerjasama dengan pihak kesehatan agar pencegahan Stunting di Indonesia berkurang demi upaya menciptakan anak bangsa yang sehat.

#### **D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain :

- a. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
- b. Peningkatan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKKN).
- d. Peningkatan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan Kecamatan Lamuru.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lamuru, maka Kecamatan Lamuru dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Pada Tahun ke-		
				2021	2022	2023
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru</b>	Meningkatkan Kualitas	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	A
	Pelayanan Publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	75	85	95	100

*Sumber Data: Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023*

## B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### STRATEGI

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah Perangkat Daerah.

### ARAH KEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah. Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui table berikut :

**Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Perangkat Daerah	Mengembangkan sistem operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Sumber Data : Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023



## C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamuru digunakan untuk mengukur kinerja utama atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamuru ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamuru yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamuru**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	-	-	B	B	A
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelayana Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	-	-	85	95	100

Sumber Data : Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023

### Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamuru Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sistem administrasi Pemerintahan	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	Jumlah aparatur yang disiplin kerja x 100% Jumlah semua aparatur Kecamatan	Data Kepegawaian	Sekretaris Camat Lamuru Seksi Pelayanan Umum Subag Umum dan Kepegawaian Subag Program dan Keuangan
2	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase cakupan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Jumlah pengaduan pelayanan publik yang masuk x 100 % jumlah pengadaan pelayanan publik yang ditinakanjuti / diselesaikan	Data pengaduan yang masuk	Seksi Pemerintahan
3	Meningkatnya pembinaan administrasi dan pengawasan aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan x 100% Jumlah Desa dan Kelurahan	Rekap kegiatan pembangunan dan rekap kegiatan yang direalisasi	Seksi PMD
4	Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes	Jumlah Desa yang dimonitoring dan pelunasan PBB dalam satu tahun x 100% Jumlah Desa	Laporan hasil monitoring dan evaluasi Desa	Seksi Pemerintahan Seksi PMD Seksi Trantib
5	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan x 100% jumlah laporan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk	Laporan jumlah gangguan Tramtibmas	Seksi Trantib



## D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023, dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana pada Tahun 2021 Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Tahun 2021 menetapkan target-target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Lamuru Tahun 2021**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.167.245.977
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.040.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	185.000.000
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	182.400.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.162.000
<b>JUMLAH</b>				<b>8.568.847.977</b>

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja dapat diakses secara lengkap dengan memindai QR Barcode berikut



## E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Bone. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

**Tabel 2.6 Standar Penilaian Kinerja**

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing-masing misi Kecamatan Lamuru dengan cara mencapainya melalui sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan serta disusun sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat prosentasi pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Lamuru meliputi:

### Tujuan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

### Sasaran

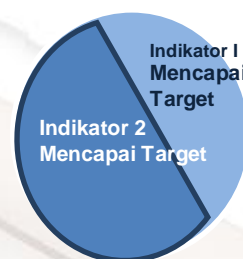
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

## 1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:



**Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	100%	Tercapai/Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	85	90	105,88%	Tercapai/Berhasil
Rata-rata				102,94%	Tercapai/Berhasil

Sumber Data: Data Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan



predikat dengan nilai 102,94% untuk indikator pertama *Tercapai*, sedangkan untuk sasaran indikator kedua telah *Tercapai*.

## 2. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lamuru 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Lamuru apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian		
			2018	2019	2020
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru</b>	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ditangani	100%	100%	100%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	100%	100%	100%
		Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat	100	100%	100%

	diselesaikan			
	Persentase Penurunan	100%	100%	100%
	Pelanggaran terhadap Perda			

### Samakan

**Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	A	A	A	B			-	-	85%		
Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100	100	100	85			100%	100%	90%		
Rata-rata		100	100	100	85			100	100	90		

Sumber Data : Dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 Kec. Lamuru

Berdasarkan Tabel 3.2 dan 3.3 diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja utama kecamatan Lamuru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kinerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami penurunan (*stagnan*) dengan Predikat B.

### 3. REALISASI KINERJA YANG MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan

**LAPORAN KINERJA  
KECAMATAN LAMURU  
TAHUN 2021**



target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Lamuru Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru</b>	Hasil Evaluasi	A	A	A	B		
	Sakip oleh Apip						
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100	100	100	90		

Sumber Data :Dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 Kec. Lamuru

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja utama yang pertama Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip belum mencapai jangka menengah, sedangkan untuk indikator kedua Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan telah mencapai target jangka menengah, sehingga target tahun berikutnya akan disesuaikan.

#### 4. REALISASI KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL/STANDAR NASIONAL LAINNYA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Lamuru dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 3.5 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
			Target 2021	Realisasi 2021
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru</b>	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	<b>A</b>	-	-
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	<b>90</b>	-	-

Sumber Data : Dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 Kec. Lamuru

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Lamuru tidak dapat disandingkan dengan standard nasional karena tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal/standar nasional lainnya.

#### 5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:



**Tabel 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= $\leq$ s/d<110	60= $\leq$ s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	100%	100%		√		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	105,88%	105,88%		√		
Rata-Rata			102.94%		√		

Sumber Data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Kec. Lamuru

Berdasarkan data pada table 3.6, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Lamuru tahun 2021 dalam kategori *Berhasil*

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan :

**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru dengan indikator:**

⇒ **Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP**

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 2018-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamuru.
2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).

3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Lamuru Tahun 2021 diperoleh rata – rata dengan Nilai 102,94 (Berhasil)
4. Laporan Kinerja Kecamatan Lamuru menyajikan data yang informatif dan analisis yang memadai
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Lamuru.

Meskipun capaian kinerja mencapai 100 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Lamuru untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2021 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

Sasaran :

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:**

⇒ **Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan**

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan publik yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan publik yang masuk kali 100%.

Jenis pelayanan publik pada kantor camat Lamuru wilayah Kabupaten Bone :

**a. KASI PEMERINTAHAN**

- Surat ahli waris
- Akte jual beli
- Realisasi laporan penduduk

**b. KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

- Surat Keterangan Domisili Usaha
- Laporan PBB

**c. KASI KEMASYARAKATAN DAN PELAYANAN**

- Surat Keluar dan masuk
- Pengurusan KK, KTP dan Akte Kelahiran



d. KASITRANTIB

- Surat pengantar rekomendasi IMB
- Penyelesaian sengketa tanah
- Dampak bencana

Indikator ini diperoleh capaian kinerja 102,94 % hal ini didukung oleh :

1. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
2. Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
3. Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.
5. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

Dalam pencapaian indikator ini meskipun 102,94 % diperoleh beberapa hambatan, antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
3. Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

## 6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Lamuru dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Lamuru adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Lamuru dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

**Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	c	D	e (d/c x100%)	F	G	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	100	8.430.550	8.430.550	100	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	85	90	102,94	584.607.450	539.804.597	90	12,94

Sumber Data : SPJ Fungsional (C3) Tahun 2021 Kecamatan Lamuru

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Lamuru terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APiP dengan capaian kinerja 100 % dan persentase capaian realisasi anggaran 100 %, menunjukkan bahwa tidak ada efisiensi.
2. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 102,94% dan persentase capaian realisasi anggaran 90%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 10% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 12,94%.



## 7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILANA/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Lamuru sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	Nilai B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase realisasi kegiatan perasngkat daerah, persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100	95	95	Akan memperbaiki system perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	95	95	Diperlukan kerjasama antar tim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	100	100	100	Diperlukan kerjasama antar tim dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase peningkatan sistem pengawasan	100	100	100	Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder

			KETERTIBAN UMUM	n internal Kecamatan				dan pihak terkait dalam hal koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana Desa	100	95	95	Diperlukan stakeholder dalam hal pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
JUMLAH					100	97	97	

Sumber Data : LPPD Tahun 2021 Kecamatan Lamuru

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

⇒ **Indikator** : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

#### ▪ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

##### ▪ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**Sasaran** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

⇒ **Indikator** : Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan.

#### ▪ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

##### ▪ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

##### ▪ Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
  - **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
    - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
  - **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
  - **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
    - Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**



- **Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

**Upaya Perbaikan**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Lamuru pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, Yaitu :

- **Tujuan :** Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan Lamuru
  - Diperlukan adanya ketetapan waktu dalam hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- **Sasaran :** Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
  1. Akan memperbaiki system perencanaan dan penganggaran
  2. Diperlukan kerjasama antar tim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
  3. Diperlukan kerjasama antar tim dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
  4. Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
  5. Diperlukan stakeholder dalam hal pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp.8.568.847.977 (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Jutan Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Realisasi Anggaran**

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamuru			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>			
	Rp. 8.167.245.977	Rp. 7.877.311.165	99,45
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
	Rp. 14.040.000	Rp. 12.210.000	87
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
	Rp. 185.000.000	Rp. 185.000.000	100
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
	Rp. 182.400.000	Rp. 177.999.600	97,58
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
	Rp. 20.162.000	Rp. 20.162.000	100
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 8.568.847.977</b>	<b>Rp. 8.272.682.765</b>	<b>96.54</b>

Sumber Data : C3 Desember 2021

## PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### A. SIMPULAN UMUM

Pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Lamuru dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamuru dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2021 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 102,94 % atau kategori *berhasil*.

### B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

Meskipun capaian pada Sasaran Indikator Utama (IKU) ini sudah optimal, namun masih tetap ada kendala pelaksanaan di lapangan antara lain, sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sasaran dan indikator masih perlu ditingkatkan lagi akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar prosedur Kecamatan Lamuru kemudian masalah organisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan tentang prosedur pelayanan menjadi salah satu kendala disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Ini diperlukan karena mengingat kondisi luas wilayah Kecamatan Lamuru sangat luas dan akses masyarakat menuju Kecamatan Lamuru belum sepenuhnya beraspal.

Upaya yang tentunya dapat terus dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Lamuru yaitu antara lain :

- Meningkatkan evaluasi pencapaian target kinerja secara periodic.
- Mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan merancang kegiatan berbasis *outcome* serta melakukan pendampingan bagi kelompok-kelompok masyarakat produktif.
- Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, RKA, sampai dengan PK dengan menyiapkan SOP perencanaan dan



optimalisasi program perencanaan.

- Melakukan Bimtek dan Pelatihan-pelatihan bagi aparatur pejabat pengawas dan pelaksana administrasi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Kecamatan Lamuru guna menunjang pelaksanaan tugas yang semakin kompleks sesuai perkembangan teknologi.

